

Syamsul Syamsul

3154-111970-1-RV.docx

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti. "Menjaga Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19", EKONIKA Jur... CROSSREF	2%
2	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id INTERNET	2%
3	repository.stie-aub.ac.id INTERNET	2%
4	repository.stiedewantara.ac.id INTERNET	1%
5	blog.iain-tulungagung.ac.id INTERNET	1%
6	123dok.com INTERNET	1%
7	indrasufian.web.id INTERNET	<1%
8	docplayer.info INTERNET	<1%
9	jurnal.pcr.ac.id INTERNET	<1%
10	pt.scribd.com INTERNET	<1%
11	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-31 SUBMITTED WORKS	<1%
12	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur on 2021-04-07 SUBMITTED WORKS	<1%
13	repository.widyatama.ac.id INTERNET	<1%
14	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
15	hetikablog.wordpress.com INTERNET	<1%
16	journal.ubaya.ac.id INTERNET	<1%

17	media.neliti.com	INTERNET	<1%
18	dl.dropboxusercontent.com	INTERNET	<1%
19	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
20	journal.univetbantara.ac.id	INTERNET	<1%
21	Iain Palopo on 2021-11-22	SUBMITTED WORKS	<1%
22	Universitas Putera Batam on 2019-06-14	SUBMITTED WORKS	<1%
23	repository.unjaya.ac.id	INTERNET	<1%
24	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id	INTERNET	<1%
25	www.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
26	Abdul Aziz, Shahibul Ahyar, Lalu Muhammad Fauzi. "Implementasi Model Problem Based Learning (PBL) dalam Meningkatkan Kema...	CROSSREF	<1%
27	jurnal.polines.ac.id	INTERNET	<1%
28	jurnal.untidar.ac.id	INTERNET	<1%
29	Academic Library Consortium on 2021-03-11	SUBMITTED WORKS	<1%
30	sarjanaekonomi.co.id	INTERNET	<1%
31	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	INTERNET	<1%
32	iskandarrudi.blogspot.com	INTERNET	<1%
33	Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2018-05-29	SUBMITTED WORKS	<1%
34	aliansi.ugr.ac.id	INTERNET	<1%
35	core.ac.uk	INTERNET	<1%
36	id.123dok.com	INTERNET	<1%
37	repository.unand.ac.id	INTERNET	<1%
38	www.scribd.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:
None

Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Citations
- Small Matches (less than 10 words)

Excluded sources:

None

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN UMKM

 SYAMSUL

STIE Panca Bhakti Palu
syamsulsyahrir@gmail.com

Abstract: This study aims to describe the financial recording and reporting system of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Data were obtained through questionnaires and interviews with SMEs in Palu City. The data analysis technique used descriptive qualitative. The results showed that the majority of MSMEs included in the micro-enterprise group had not recorded and reported financial statements. Although, there are several micro-enterprises that carry out financial recording and reporting, they are still very simple. Then, most of the small and medium-sized MSMEs have carried out financial recording and reporting both manually and computerized. Furthermore, most MSMEs have never attended financial management training, especially financial recording and reporting. Therefore, MSMEs actors want training and assistance in financial recording and reporting by the government or other institutions. This information is important for the local government and related agencies in the context of counseling and mentoring business management in the future.

Keywords: MSMEs Transactions, Accounting Systems, Financial Reports, Financial Accounting Standards

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Data diperoleh melalui kuisioner dan wawancara kepada Pelaku UMKM di Kota Palu. Teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang termasuk dalam kelompok usaha mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Akan tetapi, UMKM yang berskala kecil dan menengah sebagian besar telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan baik secara manual dan terkomputerisasi. Selanjutnya, sebagian besar UMKM belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan, khususnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pelaku UMKM menginginkan dilakukannya pelatihan maupun pendampingan pencatatan dan pelaporan keuangan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Informasi ini penting bagi pihak pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka penyuluhan dan pendampingan pengelolaan usaha di masa mendatang.

Kata kunci: Transaksi UMKM, Sistem Akuntansi, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan

PENDAHULUAN

Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memegang peran strategis dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Kontribusi UMKM cukup berarti terhadap *produk domestik bruto* (PDB), dan meningkatkan peluang kerja sehingga mereduksi tingkat pengangguran (Savitri & Saifudin, 2018). Oleh karena itu, eksistensi dan pengembangan UMKM perlu dipertahankan. Namun demikian, faktanya tidak sedikit pelaku UMKM menghadapi kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya keahlian pelaku UMKM dalam mengelola usahanya, khususnya dalam bidang keuangan. Siagian & Indra (2019) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM tidak luput dari berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, diantaranya dalam hal pengelolaan keuangan, utamanya dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Padahal, menurut Kurniawati et al. (2012) pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor utama penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu UMKM. Dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai, UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, yaitu laporan keuangan, menilai kinerja, menganalisis posisi

keuangan, dan mengetahui jumlah pajak (Warsono & Darmawan, 2010). Intinya, kelalaian dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara tidak langsung berimbas pada kecilnya kemungkinan keberhasilan UMKM di masa depan (Suryani dan Sobarjo, 2020).

Meskipun, pencatatan dan pelaporan keuangan sangat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan suatu bisnis dalam rangka pengembangan dan kesuksesan UMKM (Kurniawati et al., 2012). Akan tetapi, sampai saat ini sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan (akuntansi) sebagaimana mestinya. Argumen ini tercermin dari temuan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian Ramdani et al. (2018) yang bertujuan menelusuri permasalahan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM Warkop di Kota Makassar. Temuan mereka mengindikasikan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang disusun pengelola UMKM Warkop, hanya sebatas laporan bisnis sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan mereka saja. Kemudian, Savitri & Saifudin (2018) meneliti tentang bagaimana praktik pencatatan akuntansi dan persepsi pemilik UMKM terhadap pencatatan akuntansi. Hasilnya, menunjukkan bahwa UMKM MR. Pelagi belum maksimal dalam menerapkan sistem pencatatan akuntansi, karena pemilik berpendapat bahwa akuntansi merupakan masalah yang rumit. Selanjutnya, penelitian Siagian & Indra (2019) bertujuan mengetahui pengetahuan akuntansi pelaku UMKM. Hasil analisis mengindikasikan bahwa pelaku usaha mikro telah menyusun laporan keuangan atau catatan pembukuan meskipun terbilang sederhana. Selain itu, mereka juga menginformasikan bahwa pengelola UMKM masih kesulitan untuk membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya. Terakhir, penelitian Suryani & Subardjo (2020) dengan desain penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Hasilnya, menunjukkan bahwa seluruh informan penelitian telah melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi masih sangat sederhana dan didasarkan pada pemahaman tiap pelaku UMKM.

Singkatnya, beberapa penelitian menunjukkan mayoritas pelaku UMKM belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Meskipun diantaranya terdapat beberapa UMKM telah melakukan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi masih sangat sederhana dan belum memenuhi standar. Sayangnya, beberapa penelitian yang ada belum mengungkapkan secara utuh setiap tahapan pencatatan dan pelaporan keuangan, dengan kata lain penelitian tersebut dalam mengkaji pengelolaan keuangan UMKM belum sesuai dengan siklus akuntansi. Padahal, informasi tentang itu sangat bermanfaat dalam menyampaikan sampai sejauhmana praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, Penelitian ini berupaya mengembangkan penelitian sebelumnya dengan meneliti setiap tahapan pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM berdasarkan siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Secara khusus, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pencatatan dan pelaporan UMKM di Kota Palu? Dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah kota palu dan dinas terkait, maupun lembaga lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan UMKM di Kota Palu, ditinjau dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), disebutkan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriterianya yaitu jumlah kekayaan bersih yang dimiliki lebih kecil dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 dengan total penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000,00. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi

kriteria usaha kecil. Kriterianya, yaitu mempunyai kekayaan bersih diatas dari Rp50.000.000,00 sampai batas paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan mendapatkan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00. Kemudian, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria usaha menengah, yaitu kekayaan bersih lebih besar dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai paling banyak Rp50.000.000.000,00. Intinya, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dibentuk oleh masyarakat, baik berupa usaha perorangan maupun badan usaha (Farida, 2016) yang memenuhi kriteria UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Jusup (2016:4) akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Lebih lanjut, Jusup (2016:5) mendefinisikan akuntansi dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut proses kegiatannya. Dilihat dari sudut pemakainya, akuntansi adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Sementara itu, dari sudut kegiatannya, akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Intinya, akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan aktivitas keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, siklus akuntansi adalah tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, berawal dari terjadinya transaksi hingga terbitnya laporan keuangan. Menurut Soemarso (2004:110) siklus akuntansi dimulai dari transaksi dan bukti transaksi, jurnal, buku besar, daftar saldo, kertas kerja dan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, daftar saldo penutup, jurnal pembalik. Secara umum terdapat lima laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Kelima laporan tersebut, masing-masing mempunyai fungsi menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi bisnis suatu usaha (Kurniawati et al., 2012).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini merupakan pedoman bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan adanya SAK ETAP, usaha kecil dan menengah dapat menyusun sendiri laporan keuangan dan laporan tersebut diaudit dan memperoleh opini audit. Sehingga, laporan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha (Martani et al., 2012). Pada intinya, SAK ETAP ini disusun, bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam implementasinya dan memberikan kemudahan akses ETAP kepada sumber pendanaan dari perbankan (Hetika & Mahmudah, 2017). Adapun jenis laporan keuangan menurut SAK ETAP terdiri dari Laporan Neraca, Laba Rugi, Perubahan Modal, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya, standar Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan pedoman untuk entitas yang lebih dikhususkan bagi pemilik usaha yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Suryani & Subardjo (2020) standar EMKM ditetapkan sebagai bentuk penyederhanaan dari SAK ETAP, namun laporan keuangannya tetap memenuhi kebutuhan yang

diharapkan pelaku bisnis. Meskipun, bentuknya penyederhanaan, standar ini diharapkan mengurangi anggapan *negative* pelaku usaha bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan dalam akuntansi itu merupakan aktivitas yang sulit. Penyajian laporan keuangan berdasarkan pada SAK EMKM, hanya terdapat tiga laporan keuangan yang harus dipersiapkan oleh entitas, yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

23METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pelaku (pengelola) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudian, objek penelitian atau unit analisisnya adalah pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM. Data primer diperoleh dari pembagian kuisisioner dan wawancara terhadap pelaku UMKM di Kota Palu. Pengambilan sampling dengan metode *non probability sampling* melalui teknis incidental. Adapun yang menjadi sampling penelitian ini, sebanyak 27 pelaku usaha di Kota Palu. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan kuisisioner. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Secara umum teknik analisis data pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai sebuah sistem pengelolaan keuangan UMKM dimulai dari bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Adapun dimensi dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Objek Penelitian

Dimensi	Indikator
- Transaksi	- Bukti Transaksi
	- Penjualan (Pendapatan) Kredit
	- Penjualan (Pendapatan) Tunai
- Jurnal	- Pembelian Kredit
	- Pembelian Tunai
	- Penerimaan Uang (Kas Masuk)
	- Pengeluaran Uang (Kas Keluar)
	- Kas
	- Piutang
	- Persediaan
	- Pelengkapan
	- Aset Tetap
- Buku Besar	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
	- Utang
	- Modal
	- Prive
	- Penjualan (Pendapatan)
	- Pembelian
	- Beban-Beban
- Neraca Saldo	- Neraca Saldo
- Jurnal Penyesuaian	- Jurnal Penyesuaian
- Kertas Kerja	- Kertas Kerja

	8	- Laporan Laba Rugi
		- Laporan Perubahan Modal
- Laporan Keuangan		- Laporan Neraca
		- Laporan Arus Kas
		- Catatan Atas Laporan Keuangan
- 30 Jurnal Penutup		- Jurnal Penutup
- Neraca Saldo Setelah Penutupan		- Neraca Saldo Setelah Penutupan

Sumber: diolah dari berbagai literatur, 2021

Secara khusus, pengukuran unit analisis (objek penelitian) menggunakan skor dikotomi. Setiap item pertanyaan pada kuisioner yang dijawab “Ya” oleh responden diberi nilai 1, dan untuk item pertanyaan yang dijawab “Tidak” diberi nilai 0. Selanjutnya, dihitung jumlah responden yang menjawab “Ya” dan jumlah responden yang menjawab “Tidak” dari setiap item pertanyaan. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan menggunakan distribusi frekuensi dan diberikan penjelasan tambahan melalui hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa pelaku UMKM yang terlibat dalam penelitian ini, mayoritas UMKM yang berbentuk perseorangan, yaitu sebanyak 81,48 persen. Kemudian, UMKM tersebut sebagian besar berjenis usaha dagang yaitu sebanyak 70,37 persen. Artinya, UMKM masih sangat membutuhkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan usaha, sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 2. Deskripsi Bentuk, dan Jenis Usaha Responden

Bentuk Usaha	Jumlah	%	Jenis Usaha	Jumlah	%
Perseorangan	22	81,48	Jasa	6	22,22
CV	3	11,11	Dagang	19	70,37
PT	2	7,41	Manufaktur	2	7,41
Total	27	100	Total	27	100

Sumber: Data primer diolah Tahun 2021

Kemudian, tabel 3 juga terlihat bahwa responden atau pengelola UMKM yang terlibat dalam survei ini adalah sebagian berjenis kelamin laki-laki sebesar 59,26 persen, dan memiliki tingkat pendidikan mayoritas sarjana yaitu 40,74 persen. Sehingga, sangat memungkinkan untuk diberikan sosialisasi maupun pembinaan pengelolaan keuangan usaha.

Tabel 3. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Jumlah	%	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Laki-Laki	16	59,26	SD	1	3,70
Perempuan	11	40,74	SMP	5	18,52
			SMA	10	37,04
			Sarjana	11	40,74
Total	27	100	Total	27	100

Sumber: Data primer diolah Tahun 2021

Selanjutnya, pada tabel 4 dapat disampaikan bahwa transaksi yang paling sering dicatat oleh pelaku UMKM adalah transaksi penjualan saja, baik secara tunai maupun kredit. Pencatatan keuangan khususnya pada UMKM yang berskala mikro, pencatatan yang dilakukan sebatas mencatat jumlah

barang yang dijual, itupun tidak semua transaksi dicatat seperti itu, dengan istilah lain kadang-kadang mereka melakukan pencatatan. Kondisi ini, diperjelas dari hasil wawancara pelaku usaha, sebagai berikut.

“....usaha ini pencatatan tidak dilakukan secara detail, hanya seadanya saja. Untuk mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya....” (Joyful Bakery)

“....untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan....” (Warung Morut Sederhana)

“....kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pencatatan jadi catat yang seperlunya seperti hasil-hasil penjualan per hari lalu diakumulasikan di akhir bulan ya begitu saja pencatatannya....” (Somai Mujur).

Tabel 4. Pencatatan Transaksi UMKM

6 No.	Transaksi yang Dicatat dalam Jurnal	UMKM				Jumlah	
		Mencatat		Tidak Mencatat		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Penjualan (Pendapatan) Kredit	12	44,44	15	55,56	27	100
2	Penjualan (Pendapatan) Tunai	12	44,44	15	55,56	27	100
3	Pembelian Kredit	6	22,22	21	77,78	27	100
4	Pembelian Tunai	6	22,22	21	77,78	27	100
5	Penerimaan Uang (Kas Masuk)	4	14,81	23	85,19	27	100
6	Pengeluaran Uang (Kas Keluar)	6	22,22	21	77,78	27	100

Sumber: Data primer diolah Tahun 2021

Selain itu, hasil survei ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM melakukan pencatatan keuangan semata-mata hanya bertujuan mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran. Hasil ini sesuai dengan temuan Ramdani et al. (2018) yang menginformasikan bahwa komponen yang dilaporkan oleh pengelola UMKM, lebih dominan hanya sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Tabel 5. Penyusunan Buku Besar UMKM

No.	Menyusun Buku Besar	UMKM				Jumlah	
		Membuat		Tidak Membuat		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Kas	11	40,74	16	59,26	27	100
2	Piutang	9	33,33	18	66,67	27	100
3	Persediaan	12	44,44	15	55,56	27	100
4	Pelengkapan	7	25,93	20	74,07	27	100
5	Aset Tetap	9	33,33	18	66,67	27	100
6	Ak. Penyusutan Aset Tetap	4	14,81	23	85,19	27	100
7	Utang	11	40,74	16	59,26	27	100
8	Modal	9	33,33	18	66,67	27	100
9	Prive	5	18,52	22	81,48	27	100
10	Penjualan (Pendapatan)	15	55,56	12	44,44	27	100
11	Pembelian	15	55,56	12	44,44	27	100
12	Beban-Beban	12	44,44	15	55,56	27	100

Sumber: Data primer diolah Tahun 2021

Pada tabel 5, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak menyusun buku besar dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Selain itu, terlihat bahwa pelaku UMKM yang menyusun buku besar penjualan dan pembelian masing-masing sebesar 55,56 persen. Setelah itu, pelaku UMKM yang menyusun buku besar beban-beban dan persediaan masing sebesar 44,44 persen, penyusunan buku besar kas dan utang hanya sebesar 40,74 persen dari seluruh pelaku UMKM yang diteliti. Sementara itu, juga terekam kurang dari 40 persen pelaku UMKM yang menyusun buku besar lainnya. Fakta ini, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM hanya menyusun buku besar penjualan, pembelian, beban, persediaan, kas dan utang sebagai laporan dari pengelolaan keuangan usaha mereka. Hasil wawancara dengan pelaku usaha juga membuktikan kondisi tersebut.

“....secara rinci sampai pembuatan neraca dan buku besar saya tidak paham, apalagi bagi saya yang tidak mempunyai dasar dibidang itu....” (Bakery Kue Tradisional)

“....pencatatan atau pembukuan yang perlu dilakukan hanyalah berupa pembelian bahan baku yang digunakan setiap harinya, seperti sabun bubuk dan sampo motor. Dan juga pencatatan keuangan yang masuk setiap harinya....” (Cuci Motor Swaha).

Pada tabel 6, terlihat bahwa hanya beberapa pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan perubahan modal, yaitu sekitar 25 persen dari seluruh UMKM yang ditelusuri. Sementara itu, pelaku UMKM yang menyusun laporan neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan kurang dari 25 persen. Angka ini, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan atas usaha yang mereka jalankan. Kemudian, berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan adalah UMKM yang tergolong dalam bentuk usaha CV dan PT dengan kategori usaha kecil dan menengah.

Tabel 6. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

No.	Menyusun Laporan Keuangan	UMKM				Jumlah	
		Menyusun		Tidak Menyusun		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Laporan Laba Rugi	7	25,93	20	74,07	27	100
2	Laporan Perubahan Modal	7	25,93	20	74,07	27	100
3	Laporan Neraca	6	22,22	21	77,78	27	100
4	Laporan Arus Kas	6	22,22	21	77,78	27	100
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	6	22,22	21	77,78	27	100

16 Sumber: Data primer diolah Tahun 2021

Sederhananya, mayoritas pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan sebagaimana mestinya, utamanya UMKM yang masih masuk dalam kategori usaha kecil. Hal ini sesuai dengan ungkapan pelaku usaha berikut ini.

“....kami tidak bisa melakukan atau membuat catatan keuangan sebagaimana mestinya....” (Depot Lahiro)

“....kami tidak pencatatan keuangan karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu akuntansi....”. (Rumah Makan Seafood Banggai)

“....tidak melakukan pencatatan keuangan, karena belum terlalu menguasai tentang pembukuan pencatatan keuangan....” (Anugrah Indah)

Hasil ini sesuai dengan temuan Savitri & Saifudin (2018) mengemukakan bahwa pembukuan bagi pelaku UMKM merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan, disebabkan sempitnya pemahaman mereka

tentang ilmu akuntansi, bahkan sebagian dari pelaku UMKM beranggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting untuk disusun. Akan tetapi, kondisi ini sangat berbeda dengan Pelaku UMKM yang masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah mayoritas sudah mengoperasikan sistem kompteterisasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Fakta ini tercermin dari kutipan wawancara berikut ini.

“.... Sistem pencatatan keuangan perusahaan ini sudah berbasis komputer, makanya lebih mudah....” (PT Patrako Abadi)

Sederhananya, pada tabel 7 terlihat bahwa mayoritas pelaku UMKM yang diteliti tidak menerapkan sistem akuntansi dalam pencatatan (pengelolaan) keuangan usaha mereka. Dapat dilihat pada tabel tersebut, bahwa lebih dari 50 persen pelaku usaha tidak menjalankan prosedur akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka, mulai dari penyediaan bukti transaksi, pembuatan jurnal, buku besar, neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Kondisi ini pun, tercermin dari hasil kutipan wawancara pelaku UMKM, sebagai berikut.

“.... Memang pencatatan keuangan itu penting, tetapi karena usaha yang berjalan usaha kecil, makanya saya tidak menggunakan pencatatan keuangan....” (Fauzan Babershop).

“.... saya enggan membuat catatan keuangan, dengan cara saya sendiri saya dapat mengetahui dengan mudah jumlah uang yang keluar dan masuk....” (Kartika Motor).

Tabel 7. Penerapan Sistem Akuntansi UMKM

No.	Penerapan Sistem Akuntansi	UMKM				Jumlah	
		Membuat		Tidak Membuat		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Bukti Transaksi	12	44,44	15	55,56	27	100
2	Jurnal	12	44,44	15	55,56	27	100
3	Buku Besar	6	22,22	21	77,78	27	100
4	Neraca Saldo	6	22,22	21	77,78	27	100
5	Jurnal Penyesuaian	4	14,81	23	85,19	27	100
6	Kertas Kerja	6	22,22	21	77,78	27	100
7	Laporan Keuangan	6	22,22	21	77,78	27	100
8	Jurnal Penutup	6	22,22	21	77,78	27	100
9	Neraca Saldo Setelah Penutupan	6	22,22	21	77,78	27	100

Sumber: Data primer diolah Tahun 2021

Merujuk pada hasil survei ini, dapat dijelaskan bahwa yang paling banyak disusun oleh pelaku UMKM dari setiap tahapan pencatatan, yaitu hanya pada penyediaan bukti transaksi dan pencatatan ke dalam jurnal. Mereka hanya membuat catatan sederhana, dimana catatan tersebut memperlihatkan jumlah pembelian (modal barang) dan penjualan (omzet penjualan). Sehingga, jika mereka ingin mengetahui apakah terjadi laba atau rugi, yaitu mereka tinggal membandingkan antara jumlah penjualan dengan jumlah pembelian. Ketika jumlah penjualan lebih tinggi daripada jumlah pembelian, selisihnya itulah yang disebut untung (laba). Sebaliknya, jika jumlah penjualan lebih kecil daripada jumlah pembelian, kelebihannya itu mereka sebut rugi. Sampai pada tahapan itu saja, itupun tidak seperti yang terdapat dalam literatur-literatur akuntansi maupun standar akuntansi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagian besar para pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan sebagaimana mestinya, artinya tidak sesuai dengan sistem akuntansi.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM yang tidak membuat pencatatan dan pelaporan keuangan usaha, karena memang mereka sama sekali belum mengetahuinya. Meskipun, terdapat UMKM khususnya yang termasuk dalam kelompok mikro melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, namun belum sesuai dengan sistem akuntansi. Artinya, pencatatan keuangan yang diterapkan belum mengikuti tahapan-tahapan di dalam siklus akuntansi, dan pencatatan tersebut hanya dapat dipahami oleh pelaku UMKM itu sendiri. Hasil ini, sejalan dengan Salmiah et al. (2015) yang menemukan bahwa penerapan akuntansi bagi UMKM masih sangat sederhana atau tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Begitupula, penelitian Ramdani et al. (2018) yang mengemukakan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pengelola usaha hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing pengelola UMKM. Mestinya, hasil dari pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut juga dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal tentang kondisi keuangan perusahaan, sehingga memenuhi karakteristik informasi yaitu mudah dipahami, relevan dan akurat (Alfitri et al., 2014).

Selanjutnya, pelaku UMKM juga mengatakan bahwa selama ini memang mereka belum pernah terlibat dalam pelatihan pengelolaan keuangan instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya.

“....saya tidak pernah mendapat pelajaran tentang keuangan....”. (Cuci Motor Swaha)

Kemudian, pelaku UMKM juga memiliki harapan untuk diberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami. Seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM pada kutipan wawancara berikut.

“.... agar kedepannya bisa mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan untuk usaha....” (Depot Lahiro)

“....kedepannya ada yang mengajari masalah keuangan yang benar....” (Cuci Motor Swaha)

“....dilakukan bimbingan berupa pelatihan pengelolaan usaha....” (Kios Gisel)

“....harapannya pemerintah menyediakan pelatihan pencatatan keuangan khususnya pada yang mempunyai usaha....” (Anugrah Indah).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang masih berskala mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka dibidang tersebut. Hasil ini menguatkan argumentasi dari Savitri & Saifudin (2018) yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Dengan demikian, diperlukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, utamanya dibidang pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Sementara itu, pelaku UMKM yang tergolong dalam kelompok usaha kecil dan menengah sebagian besar telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan tahapan dalam siklus akuntansi. Pencatatan dan pelaporan keuangan mereka pun, telah berbasis komputer (*software*).

Selanjutnya, penerapan pencatatan dan pelaporan keuangan, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi usahanya, apakah terjadi perkembangan ataukah penurunan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Bahkan, dapat memberikan informasi posisi keuangan perusahaan, besarnya pemasukan dan pengeluaran perusahaan, dan informasi perubahan modal dari periode ke periode, serta jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam berbagai tujuan. Misalnya, memenuhi persyaratan untuk memperoleh tambahan modal pengembangan usaha dari pihak kreditur. Dengan kata lain, apabila pelaku UMKM konsisten dalam melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik dan

memadai. Maka, berbagai macam manfaat yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

PENUTUP

Penelitian ini menginformasikan bahwa mayoritas UMKM yang masih tergolong dalam kelompok usaha mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Meskipun, diantara UMKM yang berskala mikro tersebut, melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi belum sesuai dengan tahapan-tahapan pencatatan dan pelaporan keuangan yang ada di dalam ilmu akuntansi maupun yang diatur dalam standar penyusunan laporan keuangan. Namun, demikian untuk UMKM yang berskala kecil dan menengah sebagian besar telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan, baik secara manual dan terkomputerisasi. Selanjutnya, sebagian besar UMKM menginginkan adanya pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pelatihan. Informasi penelitian bermanfaat bagi pengambil kebijakan terkait pengembangan UMKM di masa mendatang. Penelitian ini terbatas dilakukan pada beberapa UMKM saja yang di Kota Palu, dan didominasi UMKM berskala mikro. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel penelitian yang lebih berimbang dari setiap kelompok UMKM, sehingga lebih kelihatan perbedaan antara pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM berskala mikro, kecil, dan menengah. Penelitian lain, juga dapat mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A., Ngadiman, & Sohidin. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. *Jupe UNS*, 2(2), 135–147.
- Dwinanda Adijaya Sasmita, Khozy Kamal Hanif, & Naufal Dzaky Arinata. (2019). Interpretasi Praktik Akuntansi menurut Perspektif Pengusaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 180–188. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i3.180>
- Farida, U. I. (2016). *Akuntansi Untuk Umkm* (F. Nurhayani (ed.); 1st ed.). Penerbit CV Kekata Group. http://eprints.umpo.ac.id/2828/5/UMKM_LAYFIX.pdf
- Hetika, H., & Mahmudah, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Sak Etap Pada Umkm Kota Tegal. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 5(2), 259. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.531>
- Jusup, A. H. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1* (IV). Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan Pencatatan dan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Informatics and Business Insitute Darmajaya*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5818>
- Martani, D., Veronica, S., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat.
- Ramdani, M. R., Kamidin, M., & Ajmal, A. (2018). Implementasi SAK-ETAP Pada UMKM Warkop di Kota Makassar. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 3(2), 0–19.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara.
- Salmiah, N., Indarti Siregar, & Fitri, I. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan

- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 212–226.
- Savitri, R. V., & Saifudin, . . (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 5(2), 117–125. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808>
- Siagian, A. O., & Indra, N. (2019). Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(1), 41–57.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1*. Salemba Empat.
- Suryani, N. H., & Subardjo, A. (2020). Penerapan Akuntansi Pelaku UMKM dan Kesesuaiannya Dengan SAK EMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Warsono, S., & Darmawan, A. (2010). *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipratikkan*. Asgard Chapter.